

Bekasi 30 April 2026

Nomor : 131./DIR/BSM/IV/2026

Perihal : Penyampaian Laporan Transparansi Penerapan Tata Kelola Tahun 2025 PT.BPR
Supradanamas

Kepada

DPP Perbarindo dan Media BPR
RUMAH PERBARINDO
Komp.Patra II No 46
Jl. Jend. Ahmad Yani By Pass
Cempaka Putih. Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No 12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat.

Bersama ini kami sampaikan Laporan Transparansi Penerapan Tata Kelola Tahun 2025 PT.BPR SUPRADANAMAS (terlampir)

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PT. BPR Supradanamas



Nanthen Kumar
Direktur Utama

LAPORAN PELAKSANAAN
PENERAPAN TATA KELOLA
(GCG)
PT. BPR SUPRADANAMAS
TAHUN 2025



JL. RAYA JATIWARINGIN NO 166
PONDOK GEDE BEKASI
TELEPON: 021 - 84992169

BAB I

PENJELASAN UMUM

Dalam upaya menciptakan kegiatan perbankan yg sehat & berkualitas BPR SUPRADANAMAS selalu berupaya untuk menerapkan GCG pada tahun 2025, Kecukupan SDM telah mengisi struktur organisasi dengan formasi tidak terjadi rangkap jabatan yang berpotensi terjadinya benturan kepentingan. Peningkatan kualitas SDM dilakukan dengan pelatihan dari internal dan eksternal serta pembinaan dari direksi atau pimpinan unit kerja masing masing. Kinerja BPR dapat terlihat pada laporan keuangan. Kinerja BPR tercermin pd neraca & L/ R terdapat perbaikan bila dibandingkan dengan kinerja laporan keuangan 2024. Beberapa rasio keuangan secara keseluruhan sesuai dgn ketentuan dan target tercapai. BPR memiliki komitmen yg kuat utk melaksanakan GCG yg telah diatur oleh OJK, agar BPR dapat terus tumbuh secara berkelanjutan & memiliki daya saing di industri perbankan. Penerapan GCG yang Baik pada BPR didukung oleh integritas yg tinggi melalui proses intern yg melibatkan seluruh organ BPR dari Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan agar penerapan GCG menjadi budaya perusahaan dalam setiap kegiatan usaha. BPR SUPRADANAMAS telah beroperasi lebih dari 30 tahun dan senantiasa menerapkan prinsip- prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya. Prinsip Tata Kelola yang dimaksud adalah Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi dan Kesenjajaran. Hal ini didorong oleh komitmen BPR SUPRADANAMAS untuk mencapai Visi, yaitu menjadi penyedia layanan perbankan yang terpercaya dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan dukungan SDM yg kompeten utk menciptakan nilai tambah bagi para nasabah. Dalam penerapan Tata Kelola, BPR selalu mengacu pada 3 (tiga) aspek Tata Kelola yaitu Struktur, Proses dan Hasil Tata Kelola. BPR SUPRADANAMAS terus berupaya mewujudkan Penerapan Tata kelola yang baik.

BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	NANTHEN KUMAR
	Jabatan	:	Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	a. Direksi bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan kepengurusan BPR b. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sesuai Anggaran Dasar dan Perundang-undangan. c. Melaksanakan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada setiap kegiatan usaha BPR dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham . d. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Audit Intern BPR, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau Otoritas Lainnya. e. Melaksanakan penerapan Manajemen Risiko sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha BPR f. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai. g. Melakukan Evaluasi terkait Kebijakan yang mempengaruhi kegiatan bisnis agar Kebijakan tersebut sesuai dengan kondisi terkini BPR h. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris. i. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.		
2.	Nama	:	ARI WIDHI SUNKONO
	Jabatan	:	Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	a. Bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan Bank secara profesional dengan sesuai Anggaran Dasar Perusahaan serta ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku b. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan BPR c. Menetapkan langkah - langkah untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang d. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang serta Memantau dan menjaga kepatuhan terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada OJK dan otoritas lain; e. Melakukan Evaluasi terkait Kebijakan yang mempengaruhi kegiatan bisnis agar Kebijakan tersebut sesuai dengan kondisi terkini BPR f. Melakukan tugas tugas lain yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku		
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :			

- a. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan perseroan, melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya secara independen sehingga keputusan yang diambil obyektif dan bebas dari tekanan maupun kepentingan pihak manapun
- b. Direksi telah berusaha menyelesaikan kredit bermasalah melalui penagihan secara ketat dan rutin sesuai dengan aturan yang berlaku dengan hasil terdapat penurunan NPL
- c. Direksi telah melakukan proses lelang terhadap debitur macet yang lebih dari 1 tahun sebanyak 11 debitur dengan hasil masih dalam proses lelang.

Penjelasan Lebih Lanjut :

Pengurus BPR SUPRADANAMAS yaitu Dewan Komisaris dan Direksi selalu mengkomunikasi secara rutin dalam kegiatan operasional agar sejalan dengan tata kelola yang sehat sesuai dengan ketentuan regulasi OJK. Selanjutnya pengurus secara dua arah membahas perkembangan kegiatan operasional BPR baik secara lisan maupun dalam bentuk rapat, seperti strategi dan rencana tindak BPR dalam memperbaiki tingkat kesehatan, menetapkan skala prioritas yang harus ditindaklanjuti khususnya penyelesaian kredit bermasalah

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	BACHTIAR M. MARBUN
	Jabatan	:	Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	a. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan perseroan ,melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya secara independen sehingga keputusan yang diambil obyektif dan bebas dari tekanan maupun kepentingan pihak manapun b. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Perseroan c. Melakukan reviu atas suatu transaksi dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan hasilnya dituangkan dalam bentuk rekomendasi d. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan audt dan rekomendasi dari Audit Intern, Audit Ekstern dan hasil pemeriksaan pengawas Otoritas Jasa Keuangan dan Instansi lainnya. e. Memastikan Penerapan Manajemen Risiko telah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan f. Mengkoordinir pembagian tugas Dewan Komisaris g. Memberikan saran atau advis kepada Direksi berkaitan dengan isu- isu strategis dan proses pekerjaan		
2.	Nama	:	NOFIAN
	Jabatan	:	Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	a. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan perseroan , melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya secara independen sehingga keputusan yang diambil obyektif dan bebas dari tekanan maupun kepentingan pihak manapun b. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Perseroan c. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan Audit dan rekomendasi dari Audit Intern,Audit Ekstern dan hasil pemeriksaan pengawas OJK dan instansi lain d. Memastikan Penerapan Manajemen Risiko telah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan e. Melakukan reviu atas suatu transaksi dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan hasilnya dituangkan dalam bentuk rekomendasi. f. Memberikan saran atau advis kepada kepada Direksi berkaitan dengan isu- isu strategis dan proses pekerjaan		

Rekomendasi Kepada Direksi :
a. Debitur dalam posisi bermasalah agar dilakukan penagihan dengan ketat dan rutin sesuai dengan aturan yang berlaku. b. Debitur macet yang telah lebih dari setahun agar segera dilakukan proses lelang sesuai dengan aturan yang berlaku.
Penjelasan Lebih Lanjut :
1. Kepala Kolektor mengkoordinir penagihan secara rutin dan ketat serta monitoring penyelesaiannya 2. Debitur yang macet lebih setahun agar diinventarisi kemudian dilakukan pengecekan semua persyaratan agar proses lelang berkalan cepat efektif Usaha tersebut dilakukan dalam rangka penurunan NPL agar dibawah 5 %

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
BERDASARKAN JUMLAH MODAL INTI BPR SUPRADANAMAS BELUM DIWAJIBKAN MEMILIKI / MEMBENTUK KOMITE DALAM PENYUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI,	

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1.				
2.				
3.				
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite		:	BPR SUPRADANAMAS DALAM STRUKTUR ORGANISASINYA TIDAK MEMPUNYAI ANGGOTA KOMITE INDEPENDEN.	

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite		
1.	Komite Audit		
	Program	:	
	Realisasi	:	
	Jumlah Rapat	:	
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	
	Realisasi	:	
	Jumlah Rapat	:	
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	
	Realisasi	:	
	Jumlah Rapat	:	
Penjelasan Lebih Lanjut			
KARENA TIDAK MEMPUNYAI KOMITE MAKA BPR SUPRADANAMAS TIDAK ADA PROGRAM KERJA UNTUK KOMITE			

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	NATHEN KUMAR	Rp0	0%
2.	ARI WIDHI SUNKONO	Rp0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
PADA PERIODE KERJA TAHUN 2025, DIREKSI TIDAK MEMILIKI SAHAM PADA BPR SUPRADANAMAS			

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	NATHEN KUMAR	-	-	0%
2.	ARI WIDHI SUNKONO	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
PADA TAHUN 2025, DIREKSI TIDAK MEMILIKI SAHAM DI PERUSAHAAN LAIN				

C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	NATHEN KUMAR	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	ARI WIDHI SUNKONO	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
DIREKSI TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN KEUANGAN DENGAN PEMEGANG SAHAM, ANTAR DIREKSI, ATAUPUN DENGAN DEWAN KOMISARIS				

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	NATHEN KUMAR	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	ARI WIDHI SUNKONO	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
SAMPAI SAAT INI DIREKSI TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN KELUARGA TERHADAP SESAMA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN PEMEGANG SAHAM				

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	BACHTIAR M. MARBUN	Rp.693.000.000	4.30%
2.	NOFIAN	0	0 %
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Pada Periode tahun 2025, Tn. BACHTIAR M. MARBUN sebagai Komisaris Utama dan NOFIAN sebagai Komisaris pada BPR SUPRADANAMAS tidak mengalami perubahan			

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	NOFIAN	600084	PT BPR Langgeng Lestari Bersama	1.26
2.	NOFIAN	602465	PT.BPR Artha Prima Persada	10.00
Penjelasan Lebih Lanjut :				

E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	BACHTIAR M. MARBUN	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	NOFIAN	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
DALAM KEDUDUKANNYA SEBAGAI PENGURUS DI PT. BPR SUPRADANAMAS TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN KEUANGAN TERHADAP SESAMA DEWAN KOMISARIS DAN ATAU KEPADA DIREKSI.				

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	BACHTIAR M. MARBUN	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	NOFIAN	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
DEWAN KOMISARIS TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN KELUARGA DAN ATAU TERHADAP DIREKSI				

F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	Rp.851.113.200	2	Rp.584.044.488
2.	Tunjangan	0	0	0	0
3.	Tantiem	2	Rp.185.013.250	0	Rp.99.986.750
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	0	0	0
5.	Remunerasi Lainnya	0	0	0	0
Total			Rp.1.036.126.450		Rp.684.031.238
Penjelasan Lebih Lanjut :					

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2.	Transportasi	Kendaraan Operasional (2)	Tidak ada
3.	Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan	BPJS Kesehatan
4.	Fasilitas Lainnya	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :			
1. Direksi mendapat fasilitas 2 mobil operasional untuk 2 direksi, kendaraan berupa Toyota Rush & Daihatsu Terios, dapat dibawa pulang oleh anggota direksi.			
2. Direksi mendapat fasilitas BPJS kesehatan			
3. Dewan Komisaris mendapat fasilitas BPJS Kesehatan			

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	4.49 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.59 : 1

Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.23 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1.62 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2.72 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Data diambil berdasarkan gaji bulan Desember 2025	

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	13 Januari 2025	2	Evaluasi Pertumbuhan BPR selama Tahun 2024. Agenda pembahasan adalah menganalisa pertumbuhan BPR selama tahun 2024. Analisa dilakukan terhadap indikator keuangan
2.	21 Mei 2025	2	Evaluasi 1.Pertumbuhan Aset dan Dana Pihak Ketiga BPR 2.Pertumbuhan Kredit yang Diberikan 3.Laba Rugi (Pendapatan dan Biaya) 4.Rasio Keuangan
3.	05 Agustus 2025	2	Evaluasi Perkembangan BPR Supradanamas sampai dengan Bulan Juli 2025
4.	15 Oktober 2025	2	Evaluasi Perkembangan BPR Supradanamas sampai dengan Bulan September 2025
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris selama 1 tahun sebanyak 4 kali dan telah memberikan rekomendasi kepada Direksi dan Direksi telah menindak lanjuti hasil rekomendasi Dewan Komisaris			

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	BACHTIAR M. MARBUN	4	0	100%
2.	NOFIAN	4	0	100%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Dewan Komisaris Hadir pada saat rapat dilaksanakan				

I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
1. Komisaris & Direksi memberikan contoh kepada seluruh karyawan tidak melakukan fraud dalam perusahaan. 2. Direksi dan Dewan Komisaris tidak melakukan fraud pada periode sebelum tahun laporan maupun pada periode tahun laporan 2025 3. Pegawai tetap dan Tidak Tetap tidak melakukan fraud pada periode sebelum tahun laporan maupun pada periode tahun laporan 2025.								

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1.							
2.							
3.							
Penjelasan Lebih Lanjut :							
Selama periode tahun 2025 seluruh manajemen BPR SUPRADANAMAS yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, serta masih sesuai dengan tata kelola BPR yang sehat.							

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	24 Maret 2025	Sumbangan Ormas	BPR memberikan sumbangan kegiatan Ormas	FBR Pondok Gede	100.000
2.	27 Maret 2025	Sumbangan Dukacita	Pemberian karangan bunga duka cita ibunda Komisaris BPR Supradanamas	Keluarga Pak Nofian	300.000
3.	23 Mei 2025	Sumbangan Sukacita	Pemberian uang suka cita atas pernikahan karyawan BPR Supradanamas	Ibu Elizabeth Desi	1.000.000
4	31 Juli 2025	Sumbangan Duka Cita	Pemberian Uang duka cita atas meninggalnya orang tua karyawan BPR Supradanamas		1.000.000
5	07 Agustus 2025	Sumbangan HUT RI	Pemberian sumbangan dalam rangka memeriahkan HUT RI	Panitia HUT RI dilingkungan (RT) BPR Supradanamas	200.000
6	12 Agustus 2025	Sumbangan Duka Cita	Pemberian Uang Duka cita		1.000.000
7	08 September 2025	Sumbangan Duka Cita	Pemberian karangan bunga duka cita kepada mertua Direktur BPR Supradanamas	Pak Ari Widhi Sungkono	900.000
8	9 September 2025	Sumbangan Duka Cita	Pemberian uang duka cita kepada mertua Direktur Utama BPR Supradanamas	Pak Nanthen Kumar	1.000.000

Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Pada tahun 2025 manajemen telah melakukan kegiatan sosial dan politik yang dilakukan oleh BPR, adapun kegiatannya berupa santunan sosial seperti sumbangan untuk kegiatan Ormas, Sumbangan Uang Suka Cita dan Duka Cita serta sumbangan kegiatan sosial di lingkungan sekitar kantor, namun seluruh sumbangan tersebut sifatnya insidental dan tidak mengikat dan sumbangan kepada ormas

Bekasi, 30 April 2026
BPR Supradanamas



Ari Widhi Sungkono
Direktur

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT Bank Perekonomian Rakyat Supradanamas

Pelaporan

Laporan Tahunan Bank Perekonomian Rakyat

Nomor Referensi

1039188-2-LTBPRK-R-A-20251231-010201-600042-30042026165509

Periode Data

2025

User ID Petugas Pelaporan

supradanamas@yahoo.co.id

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

29 / 29

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2026-04-30 16:55:09



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.